

Analisis legal standing komunitas konsumen Indonesia selaku lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam permasalahan perlindungan data pribadi konsumen pengguna ecommerce tokopedia (Studi kasus Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst) = Analysis of the legal standing of komunitas konsumen Indonesia as a non-governmental for consumer protection in personal data protection issue of tokopedia ecommerce users. (Case study of Verdict Number 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

Dipo Abdila Rasyid, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20518191&lokasi=lokal>

Abstrak

Permasalahan kebocoran data pribadi milik konsumen sebagai pengguna dalam platform e-commerce milik Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik kerap terjadi dalam beberapa tahun ke belakang. Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai pengemban amanat perlindungan data pribadi memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan data pribadi yang diperolehnya dari konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terhadap permasalahan mengenai perlindungan data pribadi. Hal tersebut yang menjadikan kegagalan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam Putusan nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. dalam menggugat Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun terlepas dari kegagalan tersebut, perkara a quo menjadi awal mula kepastian hukum dalam ranah perlindungan data pribadi, sebab dari sekian banyak permasalahan kebocoran data pribadi, perkara tersebut yang pertama kali masuk ke jalur pengadilan. Dalam upaya melakukan perlindungan konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memegang peran penting dalam melakukan advokasi kepada konsumen terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam melindungi data pribadi konsumen yang mereka peroleh. Dengan metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum serta peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam melakukan advokasi terhadap permasalahan kebocoran data pribadi pengguna platform e-commerce sebagai bentuk Perlindungan Konsumen.

.....The problem of leakage of personal data belonging to consumers as users of ecommerce platforms owned by Trading Business Actors through Electronic Systems has often occurred in the past few years. Trading Business Actors through Electronic Systems as the bearers of the mandate for protecting personal data have the obligation to protect personal data obtained from consumers according to existing laws and regulations. With the lack of laws and regulations governing

personal data protection, it creates legal uncertainty regarding problems regarding personal data protection. This has led to the failure of the Non-Governmental Organization for Consumer Protection in case number 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. in suing Trading Business Actors through Electronic Systems. However, despite this failure, the said case was the beginning of legal certainty in the realm of personal data protection, because of the many problems of personal data leakage, this case was the first to go to court. In conducting consumer protection, the Non-Governmental Organization for Consumer Protection plays an important role in advocating for consumers against violations or negligence committed by Trading Business Actors through Electronic Systems in protecting consumer personal data they obtain. With the juridical-normative research method, this study aims to determine the legal position and role of the Non-Governmental Consumer Protection Institution in advocating for the problem of leaking personal data of ecommerce platform users as a form of consumer protection.